

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Todaro & Smith dalam bukunya yang berjudul *Economic Development* IPM merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini menjadi penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup masyarakat, yang mencakup tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, yang mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kesehatan menjadi landasan bagi pembangunan manusia karena masyarakat yang sehat lebih produktif dan memiliki daya tahan yang lebih baik untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama pembangunan manusia karena menciptakan individu yang terampil, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Daerah dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pendapatan, yang digunakan sebagai indikator standar hidup, menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan lainnya. Dimensi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi mencakup seluruh masyarakat. IPM digunakan sebagai alat perencanaan karena dapat Mengukur Kesenjangan dengan

cara IPM membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang tertinggal, sehingga kebijakan pembangunan dapat difokuskan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. IPM juga dapat mengevaluasi Program Pembangunan dengan mengamati tren IPM dari waktu ke waktu, pemerintah daerah dapat mengevaluasi apakah program pembangunan yang dilakukan telah mencapai sasaran. IPM menentukan Prioritas Kebijakan berdasarkan hasil IPM, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas anggaran untuk bidang-bidang yang paling membutuhkan perhatian, seperti kesehatan, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur. Target Pembangunan Berkelanjutan menurut IPM juga selaras dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam konteks pembangunan daerah, IPM menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, IPM bukan hanya alat pengukuran, tetapi juga panduan strategis dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah. Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia secara lebih komprehensif daripada sekadar indikator ekonomi seperti pendapatan nasional bruto (GNP) atau produk domestik bruto (GDP)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Hal yang signifikan terkait IPM di Indonesia adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Secara umum, IPM Indonesia menunjukkan perbedaan yang mencolok antara daerah-daerah di Pulau

Jawa dan luar Pulau Jawa. Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa, seperti Papua, Nusa Tenggara, dan sebagian besar wilayah Kalimantan. Perbedaan ini dapat dilihat dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Penyebab ketimpangan ini antara lain adalah terbatasnya infrastruktur di daerah terpencil, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta ketergantungan ekonomi pada sektor primer yang masih dominan di banyak daerah. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang luas dalam pencapaian IPM di seluruh Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan dalam indikator kesehatan yang berkontribusi positif terhadap kenaikan IPM Indonesia. Salah satu indikator kesehatan yang menunjukkan perbaikan adalah angka harapan hidup yang terus meningkat. Pada tahun 1990, angka harapan hidup Indonesia berada di sekitar 64 tahun, namun pada tahun 2020, angka tersebut telah mencapai sekitar 71 tahun. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh perbaikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah perkotaan. Selain itu, penurunan angka kematian bayi dan meningkatnya cakupan imunisasi juga berperan dalam pencapaian ini. Namun, meskipun ada perbaikan signifikan, tantangan tetap ada, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil dan kurang berkembang. Masih banyak kasus malnutrisi, stunting pada anak, serta tingginya angka kematian ibu melahirkan di beberapa daerah. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Banyak daerah yang masih kesulitan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di

daerah pedalaman dan kawasan perbatasan. Selain itu, kualitas tenaga pengajar dan kurikulum yang kadang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi isu yang belum terpecahkan. Meskipun tingkat partisipasi pendidikan dasar di Indonesia relatif tinggi, pendidikan lanjutan (seperti SMA dan perguruan tinggi) masih terkendala oleh faktor ekonomi, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ketimpangan pendidikan ini berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi IPM secara keseluruhan. Urbanisasi yang pesat di Indonesia juga mempengaruhi perkembangan IPM secara signifikan. Urbanisasi ini terjadi seiring dengan meningkatnya migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Banyak penduduk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, serta akses layanan kesehatan yang lebih baik. Proses urbanisasi ini memiliki dampak positif terhadap IPM di kawasan perkotaan, yang terlihat dari indikator kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di kota-kota besar. Penduduk kota biasanya memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas medis dan pendidikan yang berkualitas, yang berkontribusi pada meningkatnya angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga menimbulkan tantangan bagi kota-kota besar, seperti kemiskinan perkotaan, peningkatan jumlah penduduk yang tidak terlayani dengan baik, dan ketidakmerataan distribusi kesejahteraan. Urbanisasi juga menambah tantangan dalam menjaga kestabilan pencapaian IPM yang merata di seluruh Indonesia, terutama dalam menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi antarwarga kota dan daerah.

IPM bertujuan memberikan gambaran yang holistik tentang kualitas hidup masyarakat dengan mengintegrasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Namun IPM memiliki tujuan utama yaitu, Mengukur Kesejahteraan Masyarakat, Sebagai Alat Perbandingan Antar-Wilayah atau Negara, Mendorong Kebijakan yang Lebih Inklusif, Mengidentifikasi Masalah Pembangunan (*Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith, 2020*).

Gap Penelitian

Penelitian oleh Nuraini et al. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan secara signifikan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Sebaliknya, inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap IPM, menekankan pentingnya kombinasi kebijakan ekonomi dan pengeluaran publik dalam mendukung pembangunan manusia. Namun, terdapat beberapa *gap* yang memerlukan studi lanjut. Pertama, alasan di balik tidak signifikannya pengaruh inflasi terhadap IPM belum dijelaskan secara mendalam. Kedua, penggunaan data agregat nasional belum mencakup variasi pembangunan manusia di tingkat daerah. Ketiga, IPM sebagai satu-satunya indikator dapat diperluas dengan dimensi lain, seperti kesetaraan gender atau akses pendidikan tinggi. Terakhir, metodologi OLS yang digunakan lebih fokus pada korelasi, sehingga diperlukan pendekatan kausalitas untuk memahami hubungan sebab-akibat. Penelitian lanjutan yang mengatasi gap ini dapat memberikan kebijakan pembangunan manusia yang lebih efektif.

Penelitian Sugiarto, T., & Subroto, W. T. (2019) menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur kesehatan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. *Gap* penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang belum terjelajahi, seperti kualitas infrastruktur, yang berpotensi memberikan pengaruh lebih besar dibanding kuantitasnya. Selain itu, penelitian ini belum menganalisis faktor moderasi atau mediasi, seperti efektivitas kebijakan pemerintah atau tingkat pemanfaatan infrastruktur, yang dapat memperkuat hubungan tersebut. Data yang digunakan (2007–2017) juga belum mencakup analisis terkini atau pendekatan spasial untuk memahami perbedaan pengaruh antar wilayah di Jawa Timur. Dengan demikian, penelitian lanjutan yang mempertimbangkan variabel tambahan, analisis kualitas infrastruktur, dan pendekatan spasial-temporal dapat memperkaya wawasan mengenai dampak infrastruktur kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Swastika dan Arifin (2023) menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, dan pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Hasil menunjukkan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif namun tidak signifikan, umur harapan hidup berpengaruh negatif signifikan, dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif signifikan. *Gap* penelitian terletak pada efektivitas pendidikan terhadap produktivitas, dampak negatif umur harapan hidup yang tidak biasa, dan rincian komponen pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lanjutan perlu mendalami kualitas pendidikan, beban sosial-ekonomi, dan struktur pengeluaran dalam konteks wilayah urban seperti DKI Jakarta.

Gap Teori

Penelitian Nuraini et al. (2020) menyoroti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, serta inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Namun, terdapat beberapa gap teoritis yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak signifikannya pengaruh inflasi terhadap IPM belum dijelaskan secara mendalam, bertentangan dengan Teori Phillips Curve yang menyatakan inflasi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kedua, Teori Modal Manusia (Becker, 1964; Schultz, 1961) belum mempertimbangkan disparitas akses pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah. Ketiga, penggunaan IPM sebagai satu-satunya indikator mengabaikan dimensi lain seperti kesetaraan gender dan akses pendidikan tinggi, yang lebih sesuai dengan Teori Pembangunan Manusia (Sen, 1999). Terakhir, metode *Ordinary Least Squares* (OLS) lebih menyoroti korelasi daripada hubungan kausal, sehingga belum sepenuhnya menangkap dampak jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam Teori Pertumbuhan Endogen (Romer, 1986; Lucas, 1988).

Gap Teori dalam Penelitian Sugiarto, T., & Subroto, W. T. (2019) Penelitian ini mengacu pada Teori Pertumbuhan Endogen dan Teori Modal Manusia, yang menekankan bahwa infrastruktur kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif tetapi tidak signifikan, menimbulkan gap teoritis. Pertama, penelitian ini belum menggali kualitas infrastruktur sebagai faktor yang mungkin lebih berpengaruh dibandingkan kuantitasnya, seperti yang ditekankan dalam Teori Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi. Kedua, belum

dianalisis faktor moderasi atau mediasi seperti efektivitas kebijakan pemerintah atau tingkat pemanfaatan infrastruktur, padahal Teori Efektivitas Kebijakan Publik menekankan pentingnya tata kelola dalam meningkatkan dampak infrastruktur. Ketiga, penelitian ini belum menerapkan pendekatan spasial-temporal, yang relevan dengan Teori Spillover dan Eksternalitas Positif, untuk memahami variasi dampak antarwilayah.

Gap Teori dalam Penelitian Swastika dan Arifin (2023) mengacu pada Teori Modal Manusia dan Teori Pertumbuhan Endogen, yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan seharusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, temuan menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah tidak signifikan, umur harapan hidup berpengaruh negatif signifikan, dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif signifikan, yang menimbulkan gap teoritis. Pertama, ketidaksignifikanan rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan lebih berpengaruh dibanding sekadar kuantitasnya, seperti yang ditekankan dalam Teori Strukturalis Pembangunan Ekonomi. Kedua, pengaruh negatif umur harapan hidup bertentangan dengan Teori Modal Manusia, dan lebih sesuai dengan Teori Beban Ekonomi Lansia, yang menyatakan bahwa umur panjang bisa meningkatkan beban sosial-ekonomi. Namun, mekanisme spesifiknya belum dijelaskan. Ketiga, dalam Teori Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi, pengeluaran per kapita seharusnya mendorong pertumbuhan, tetapi penelitian ini belum merinci komponen pengeluaran yang paling berkontribusi. Dengan demikian, gap teori terletak pada belum terjasasnya peran kualitas pendidikan, dampak sosial-ekonomi dari umur panjang, serta struktur pengeluaran

per kapita dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian lanjutan perlu mendalami aspek-aspek ini dalam konteks urban seperti DKI Jakarta.

Tabel 1. 1 Laju Indeks Pembangunan Manusia (Persen) & Indikator IPM

Tahun 1995 sampai 2023

Tahun	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	Indikator IPM			
			Kesehatan	Pendidikan	Pendapatan	
					Rupiah	%
1995	60,7	8,2	66,0	51,67	172.500	0,29
1996	61,4	7,8	66,3	52,50	190.000	0,32
1997	62,1	4,7	66,6	53,33	210.000	0,35
1998	62,4	-13,1	66,9	54,17	220.000	0,37
1999	62,7	0,8	67,2	55,00	231.000	0,39
2000	63,2	4,9	67,5	55,83	344.257	0,59
2001	63,6	3,6	67,8	56,67	426.250	0,73
2002	64,1	4,5	68,1	57,50	591.300	1,01
2003	64,5	4,8	68,4	58,33	631.554	1,08
2004	65,1	5,0	68,7	59,17	671.550	1,14
2005	65,5	5,7	69,0	60,00	711.843	1,21
2006	66,2	5,5	69,3	60,83	819.100	1,39
2007	66,8	6,3	69,6	61,67	882.000	1,50
2008	67,5	6,0	69,9	62,50	972.604	1,66
2009	68,2	4,6	70,2	63,33	1.069.865	1,82
2010	68,8	6,2	70,5	62,17	1.118.009	1,90
2011	69,5	6,5	70,8	62,67	1.290.000	2,20
2012	70,2	6,3	71,1	63,25	1.529.150	2,60
2013	70,8	5,6	71,4	63,42	2.200.000	3,75
2014	71,2	5,0	71,7	64,42	2.441.301	4,16
2015	71,6	4,9	72,0	65,33	2.700.000	4,60
2016	72,0	5,0	72,3	66,25	3.100.000	5,28
2017	72,5	5,1	72,6	67,50	3.355.750	5,71
2018	73,0	5,2	72,9	68,08	3.648.035	6,21
2019	73,4	5,0	73,2	69,50	3.940.973	6,71
2020	73,8	-2,1	73,5	70,67	4.276.349	7,29
2021	74,0	3,7	73,7	71,17	4.416.186	7,52
2022	74,3	5,3	73,9	72,42	4.641.854	7,91
2023	74,6	5,05	74,1	73,33	4.901.798	8,35
2024	75,0	5,03	74,3	74,17	5.067.381	8,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 1995 sampai 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil meskipun dengan pertumbuhan yang

relatif moderat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Indonesia berada pada angka 71,92. Kemudian, pada 2020, IPM meningkat tipis menjadi 71,94, dengan pertumbuhan sebesar 0,03%. Pertumbuhan yang kecil ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang membatasi pencapaian di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tahun berikutnya, yaitu 2021, IPM Indonesia kembali meningkat ke 72,29, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,49%*dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pemulihan ekonomi pascapandemi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Pada 2022, IPM mengalami lonjakan yang lebih signifikan, mencapai 73,77. Pertumbuhan sebesar 2,05% ini mencerminkan dampak dari kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan di berbagai wilayah. Terakhir, pada 2023, IPM mencapai angka 74,39, tumbuh 0,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terlihat di semua dimensi IPM: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Misalnya, harapan hidup saat lahir meningkat sebesar 0,31%, harapan lama sekolah naik 0,38%, dan rata-rata lama sekolah bertambah 0,92%. Di sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita naik sebesar 3,66%, menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Secara kumulatif, IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,43% dari tahun 2019 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 0,86%. Meski ada perkembangan positif, tantangan seperti ketimpangan antarwilayah, kesenjangan pendidikan, dan akses layanan kesehatan masih menjadi isu utama yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan IPM yang lebih inklusif dan merata. Data ini menunjukkan bahwa,

meskipun tren pembangunan manusia terus meningkat, upaya lebih besar masih diperlukan untuk mencapai pemerataan dan keberlanjutan dalam pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dapat menyediakan sumber daya yang lebih besar untuk investasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan IPM. Sebaliknya, peningkatan IPM melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB. Namun, meskipun terdapat hubungan positif antara PDRB dan IPM, ketimpangan dalam distribusi PDRB antar daerah dapat menyebabkan disparitas dalam capaian IPM. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan variasi signifikan dalam PDRB antar provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2022, DKI Jakarta memiliki PDRB sebesar Rp3.188.539,02 miliar, sedangkan provinsi lain seperti Jawa Barat memiliki PDRB sebesar Rp2.422.782 miliar. Perbedaan signifikan dalam PDRB ini berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan manusia, di mana daerah dengan PDRB tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik dibandingkan daerah dengan PDRB rendah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana distribusi PDRB mempengaruhi IPM di berbagai wilayah, serta merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi disparitas tersebut untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan

Berdasarkan uraian tersebut dan mengacu pada fenomena yang terjadi , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**. Didasarkan pada relevansi isu, adanya celah penelitian terdahulu, dan pentingnya kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Ketiga dimensi ini memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kualitas sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu sering kali hanya berfokus pada salah satu aspek pembangunan manusia, seperti pendidikan atau kesehatan, tanpa mengintegrasikan ketiga dimensi IPM secara keseluruhan. Selain itu, banyak penelitian dilakukan pada tingkat global atau regional, sehingga konteks spesifik Indonesia yang memiliki karakteristik unik sering kali terabaikan. Misalnya, isu kesenjangan pembangunan antarwilayah, dampak kebijakan desentralisasi, dan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia belum banyak dibahas secara mendalam.

Di sisi lain, penelitian yang ada cenderung menggunakan data statis atau jangka pendek, padahal dampak pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi sering kali bersifat jangka panjang. Investasi dalam pendidikan, misalnya, baru menunjukkan hasil signifikan beberapa tahun kemudian dalam bentuk peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan analisis yang lebih dinamis untuk mengisi celah penelitian yang ada.

Penelitian ini penting karena tidak hanya memberikan kontribusi akademis dengan menawarkan perspektif baru, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi perencanaan kebijakan. Dengan memahami hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Penelitian ini juga relevan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama dalam aspek pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan pengurangan ketimpangan.

Secara metodologis, penelitian ini dirancang untuk menggunakan data empiris dari sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pendekatan analisis kuantitatif yang mencakup regresi panel atau analisis data time series. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berupaya menemukan hubungan kausal antara IPM dan pertumbuhan ekonomi, termasuk faktor-faktor lain seperti peran kebijakan desentralisasi dan transformasi struktural ekonomi. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mengisi celah penelitian terdahulu yang masih kurang eksploratif dalam mengkaji hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

1.2 Identifikasi masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat pengukur yang dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan suatu negara dalam

dimensi-dimensi utama kesejahteraan manusia: kesehatan (diukur dengan harapan hidup), pendidikan (diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup (diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto per kapita).

- Pengaruh Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kesehatan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP). Kesehatan yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena menurunkan produktivitas kerja dan meningkatkan biaya kesehatan. Penyakit seperti malaria berdampak besar pada ekonomi. UNDP menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan kesehatan masyarakat. Investasi di sektor kesehatan, seperti imunisasi dan layanan kesehatan yang lebih baik, dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

- Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. menurut UNDP, pendidikan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pendidikan yang berkualitas dan inklusif dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, tantangan

seperti disparitas akses dan relevansi keterampilan dengan kebutuhan industri perlu diatasi untuk memastikan manfaat pendidikan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

- Pengaruh Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia bersifat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks regional dan faktor sosial-ekonomi yang melingkupinya. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dimensi lain seperti kesehatan dan pendidikan memberikan dampak yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Meskipun menjadi alat yang sangat populer untuk mengukur kesejahteraan manusia, IPM menghadapi beberapa tantangan serius dalam penggunaannya. IPM tidak mempertimbangkan faktor penting lain yang memengaruhi kesejahteraan manusia, seperti ketimpangan sosial, kualitas pendidikan, akses ke layanan kesehatan, atau dampak lingkungan. Hal ini membuat IPM sering dianggap terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas pembangunan manusia secara menyeluruh. Salah satu kritik utama terhadap IPM adalah kurangnya perhatian terhadap ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan di dalam suatu negara. Misalnya, sebuah negara dapat memiliki nilai IPM tinggi secara agregat tetapi menyembunyikan ketimpangan besar antarwilayah atau kelompok masyarakat.

Ketimpangan ini dapat memengaruhi bagaimana IPM mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, IPM menghadapi kritik karena tidak memasukkan indikator lingkungan. Misalnya, penelitian oleh Pineda (2012) menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia dapat disertai dengan eksploitasi lingkungan yang berlebihan, sehingga tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini memperkenalkan *Sustainability-Adjusted Human Development Index* (SHDI) yang mengintegrasikan dampak lingkungan seperti emisi karbon dalam penghitungan IPM untuk memberikan gambaran yang lebih holistik (Pineda, 2012). Dalam beberapa kasus, negara-negara yang menunjukkan peningkatan di dimensi pendidikan atau pendapatan sering kali mengabaikan aspek kesehatan, seperti kualitas hidup dan akses layanan kesehatan dasar. Hal ini menciptakan paradoks di mana pembangunan manusia tidak selalu seimbang antar dimensi. IPM tidak selalu dapat menggambarkan konteks spesifik suatu wilayah atau negara. Misalnya, dalam konteks negara-negara berkembang, faktor sosial seperti diskriminasi berbasis gender, etnis, dan status ekonomi dapat menjadi penghambat besar bagi pembangunan manusia yang setara. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa IPM perlu terus dikembangkan untuk lebih mencerminkan kompleksitas pembangunan manusia. Salah satu solusi potensial adalah pengintegrasian indeks-indeks tambahan, seperti Indeks Ketimpangan *Gender* (GII) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI), untuk melengkapi pengukuran yang ada. Selain itu, pengenalan indikator lingkungan dalam perhitungan IPM akan membantu menciptakan alat yang lebih relevan untuk mengukur

pembangunan manusia dalam era perubahan iklim global.

1.3 Batasan dan rumusan masalah

1.3.1 Batasan masalah

Penelitian ini dibatasi untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IPM mencakup tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Penelitian ini fokus pada pengaruh agregat IPM terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa membedakan kontribusi masing-masing dimensi secara terpisah. Analisis menggunakan data sekunder yang mencakup periode tertentu berdasarkan ketersediaan data, seperti data dari BPS dan instansi terkait. Penelitian ini tidak mencakup faktor eksternal lain yang mungkin memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi asing, kebijakan fiskal, atau dinamika global. Selain itu, wilayah cakupan penelitian dibatasi pada tingkat nasional tanpa melihat perbedaan antar provinsi.

1.3.2 Rumusan masalah

1. Apakah kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
2. Apakah pendidikan dalam IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
3. Apakah standar hidup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kesehatan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh standar hidup terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi Akademisi

- Memberikan data empiris yang dapat digunakan sebagai referensi untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia.
- Membantu instansi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang mendukung peningkatan IPM.
- Memperkuat sinergi antar-instansi dalam merancang program yang berfokus pada penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Indonesia

- Menyediakan informasi penting yang dapat digunakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia.
- Membantu pemerintah mengevaluasi dampak investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- Mendukung perumusan program pembangunan yang lebih tepat sasaran

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN dan RPJP).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Memperluas wawasan peneliti tentang hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks Indonesia.
- Memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis mendalam yang dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa depan.
- Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan analisis kuantitatif maupun kualitatif yang relevan dengan isu pembangunan manusia dan ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indikator yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sejak tahun 1990. Indikator ini dirancang untuk mengukur dan menilai kemajuan suatu negara dalam hal pembangunan manusia, yang didefinisikan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan hidup manusia serta meningkatkan kemampuan dasar mereka untuk hidup dengan bermartabat. IPM berfokus pada tiga dimensi utama yang dianggap penting dalam mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup suatu masyarakat:

1. **Kesehatan:** Dimensi ini diwakili oleh harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas layanan kesehatan suatu negara.
2. **Pendidikan:** Dimensi pendidikan diukur melalui dua indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) untuk populasi dewasa dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) untuk anak-anak.
3. **Pendapatan:** Dimensi ini dihitung berdasarkan Pendapatan masyarakat yang mencerminkan kemampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2.1.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Ada beberapa teori- teori Indeks Pembangunan Manusia dari beberapa ahli yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, teori tersebut antara lain :

1. Teori Gary S Becker

Dalam pandangan Gary S. Becker, pembangunan manusia merupakan bagian integral dari pertumbuhan ekonomi melalui konsep *human capital*. Becker berpendapat bahwa investasi dalam diri manusia—baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun peningkatan kesehatan—adalah bentuk nyata dari investasi ekonomi yang memiliki imbal hasil dalam jangka panjang. Baginya, kualitas sumber daya manusia menentukan kapasitas individu untuk menghasilkan pendapatan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan manusia bukan hanya dimensi sosial, tetapi merupakan strategi ekonomi yang rasional dan terukur.

Becker menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan meningkatkan nilai produktif seseorang dalam pasar tenaga kerja. Seorang individu yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki keterampilan dan pemahaman yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas ekonomi, sementara kondisi kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih lama dan dengan kapasitas optimal. Dalam kerangka pemikiran ini, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejalan dengan peningkatan modal manusia sebagaimana didefinisikan oleh Becker. Dengan demikian, IPM bukan sekadar ukuran sosial, tetapi dapat dilihat sebagai indikator kekuatan ekonomi suatu negara melalui kualitas manusianya.

Lebih jauh, Becker memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada akumulasi modal fisik, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan modal manusianya. Ia meyakini bahwa negara-negara yang gagal berinvestasi

dalam pendidikan dan kesehatan akan menghadapi keterbatasan dalam menciptakan produktivitas tinggi. Oleh sebab itu, dalam perspektif Gary S. Becker, kebijakan pembangunan manusia yang ditunjukkan melalui perbaikan IPM seharusnya diposisikan sebagai prioritas utama dalam strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2. *United Nations Development Programme (UNDP)*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* untuk mengukur kualitas pembangunan suatu negara tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan manusia. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan ukuran seperti Produk Domestik Bruto (PDB) yang dianggap kurang mampu merepresentasikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. IPM pertama kali diperkenalkan dalam laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report* pada tahun 1990, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup manusia melalui pengukuran pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi ini dipilih karena dianggap sebagai elemen fundamental yang dapat mencerminkan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

IPM telah menjadi alat yang sangat berguna bagi pemerintah, organisasi internasional, dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi serta merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan

menggunakan IPM sebagai acuan, negara-negara dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam pembangunan dan merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Selain itu, IPM juga berfungsi sebagai alat pemantauan yang memungkinkan negara-negara untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Melalui pendekatan multidimensional yang diusung oleh UNDP, pembangunan manusia diharapkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan antar kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, IPM memberikan pandangan yang lebih luas mengenai makna pembangunan dan mendorong negara-negara untuk berinvestasi dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi secara seimbang. Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berpendidikan, dan sehat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya konsep pembangunan manusia, UNDP terus memperbarui metode pengukuran dan indikator yang digunakan dalam IPM untuk memastikan bahwa indeks ini tetap relevan dengan tantangan global saat ini, seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi yang pesat.

Implementasi teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) di Indonesia telah menjadi salah satu acuan utama dalam merancang kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menggunakan IPM sebagai indikator penting untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di tingkat

nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan fokus pada tiga dimensi utama kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak—Indonesia telah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai program dan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan IPM di seluruh wilayah. Meski demikian, tantangan seperti kesenjangan antarwilayah, ketimpangan sosial-ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar masih menjadi perhatian utama dalam implementasi konsep IPM di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih terdapat kesenjangan antarprovinsi yang cukup signifikan. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal agar kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat dikurangi. Pemerintah juga terus mengembangkan kebijakan berbasis data dengan menggunakan IPM sebagai salah satu tolok ukur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Secara keseluruhan, implementasi teori IPM di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, tantangan struktural seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan anggaran, serta dinamika sosial dan politik menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta

masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan IPM-nya secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

2.1.2 Tujuan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang dirancang untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Tujuan utama IPM adalah memastikan pembangunan manusia yang berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dasar untuk hidup dengan bermartabat. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, IPM memainkan peran penting karena kualitas sumber daya manusia yang tinggi menjadi kunci dalam mendorong produktivitas dan inovasi yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi.

Dengan meningkatkan IPM, suatu negara dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih sehat dan terampil. Pendidikan yang lebih baik, misalnya, menghasilkan individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar global, sementara kesehatan yang baik memastikan tenaga kerja yang lebih produktif. Selain itu, peningkatan standar hidup melalui pendapatan yang layak mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat konsumsi domestik sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. Dengan demikian, IPM tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan siklus positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh lagi, IPM berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial yang sering menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Ketika akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan merata, kesenjangan sosial dapat

diminimalkan, menciptakan stabilitas sosial dan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Hal ini memungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan fokus pada peningkatan IPM, pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pada angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Berikut merupakan Kelebihan dan kekurangan dari Indeks Pembangunan Manusia :

➤ **Kelebihan:**

- IPM memberikan pandangan holistik tentang kesejahteraan masyarakat yang mencakup dimensi sosial dan ekonomi.
- Sederhana dan mudah dipahami, sehingga sering digunakan oleh pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum.

➤ **Kelemahan:**

- IPM tidak memasukkan aspek ketimpangan dalam distribusi pembangunan di suatu negara.
- Tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan keberlanjutan.
- Sering kali, dimensi pendidikan dan pendapatan dianggap kurang mewakili kualitas hidup secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konsep pengukuran pembangunan manusia yang berbasis pada pendekatan kapabilitas, yaitu gagasan bahwa pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kemampuan individu untuk menjalani hidup yang bermakna. Konsep ini diperkenalkan sebagai

alternatif dari indikator ekonomi semata, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Konsep IPM berakar pada pemikiran Amartya Sen dan Mahbub ul Haq, yang menekankan bahwa pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan dan kebebasan individu. Dalam hal ini, pembangunan tidak sekadar tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup penguatan aspek-aspek fundamental kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pendekatan ini menganggap manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. IPM dirancang untuk memberikan pandangan yang lebih holistik tentang pembangunan manusia, dengan tujuan:

- Mengukur pencapaian suatu negara dalam tiga dimensi utama kesejahteraan.
- Menyediakan indikator sederhana namun komprehensif yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi pembangunan.
- Membandingkan pencapaian pembangunan antarnegara dan antarwaktu.

Meskipun IPM merupakan alat yang kuat, ia juga memiliki keterbatasan, seperti:

- Tidak mencerminkan ketimpangan dalam distribusi pembangunan di dalam suatu negara.
- Tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan modern.
- Fokus pada rata-rata nasional dapat menyembunyikan disparitas regional atau antargrup sosial di dalam negara.

Penelitian oleh Pineda (2012) menunjukkan bahwa untuk membuat IPM lebih relevan dalam era modern, perlu dilakukan penyesuaian yang memasukkan dimensi keberlanjutan lingkungan. Dalam konsep *Sustainability-Adjusted Human Development Index* (SHDI), pembangunan manusia harus diukur dengan mempertimbangkan dampak lingkungan seperti emisi karbon dan penggunaan sumber daya secara berlebihan. Hal ini menghubungkan pembangunan manusia dengan prinsip keberlanjutan intergenerasional, sehingga memberikan kerangka kerja yang lebih holistik dan adil .

2.1.3 Indikator IPM

Menurut United Nations Development Programme (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia memiliki 3 indikator utama yaitu :

1. Kesehatan

Dimensi kesehatan dalam IPM diukur melalui harapan hidup saat lahir, yang merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan suatu populasi. Harapan hidup menjadi cerminan dari berbagai faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan gizi yang memadai, kebersihan lingkungan, serta tingkat keamanan sosial dan ekonomi masyarakat. Negara dengan harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki akses yang baik terhadap fasilitas kesehatan, pola hidup sehat, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan publik. Sebaliknya, harapan hidup yang rendah dapat menjadi indikator adanya tantangan seperti tingginya angka kematian bayi, penyebaran penyakit menular, atau keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

2. Pendidikan

Dimensi pendidikan dalam IPM diukur melalui dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia dewasa, yang menunjukkan tingkat pendidikan aktual yang telah diperoleh oleh masyarakat. Sementara itu, harapan lama sekolah memberikan gambaran mengenai ekspektasi jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak-anak yang baru memasuki sistem pendidikan. Dimensi ini sangat penting karena pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik. Negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan melalui akses yang merata dan kurikulum yang relevan menjadi fokus utama dalam pembangunan manusia.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup yang layak diukur melalui Pendapatan masyarakat yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, air bersih, dan layanan sosial lainnya. Meski demikian, UNDP menekankan bahwa pendapatan ekonomi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesejahteraan manusia. Sebuah negara dengan pendapatan tinggi belum tentu memiliki tingkat pembangunan manusia yang baik jika distribusi kekayaan tidak merata dan akses terhadap layanan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, dalam mengukur kesejahteraan manusia, IPM berusaha

untuk menyeimbangkan faktor ekonomi dengan faktor sosial dan lingkungan yang dapat menciptakan kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan.

2.1.4 Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan masyarakat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bernilai, sehat, berpendidikan, dan sejahtera. Salah satu alat utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM berfungsi sebagai indikator komposit yang menggabungkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pendidikan, serta standar hidup layak. Kesehatan dalam IPM diukur menggunakan indikator harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*). Dimensi ini mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai, kebersihan lingkungan, serta keamanan pangan. Harapan hidup menjadi elemen penting untuk memahami kualitas hidup secara umum. Pendidikan diukur melalui dua indikator utama: rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Rata-rata lama sekolah menunjukkan pencapaian pendidikan populasi dewasa, sedangkan harapan lama sekolah mencerminkan ekspektasi terhadap lama waktu belajar anak-anak di usia sekolah. Kombinasi kedua indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat aksesibilitas dan kualitas sistem pendidikan suatu negara. Pendapatan mencerminkan standar hidup dan diukur menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). Komponen ini memberikan gambaran mengenai kemampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi.

Metode Penghitungan

IPM dihitung menggunakan pendekatan geometris untuk menghindari substitusi sempurna antara dimensi-dimensi tersebut. Rumus IPM dapat dirangkum sebagai berikut:

$IPM = 1/3 (X_1 + X_2 + X_3)$ <p>Keterangan: X_1 = Indeks Harapan Hidup X_2 = Indeks Pendidikan X_3 = Indeks Standar Hidup Layak</p> <p>Dimana: $X_2 = 2/3$ [Indeks Melek Huruf] + $1/3$ [Indeks Rata-rata Lama Sekolah]</p>

Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri yang distandarkan dalam rentang nilai 0 hingga 1, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan pencapaian yang lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung menggunakan nilai standar dari setiap komponennya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nilai IPM berada dalam rentang 0 hingga 1, yang merepresentasikan tingkat pembangunan manusia, di mana:

- **0:** Menunjukkan tingkat pembangunan manusia terendah atau kondisi yang sangat buruk dalam ketiga dimensi (kesehatan, pendidikan, dan pendapatan).
- **1:** Menunjukkan tingkat pembangunan manusia tertinggi, yang berarti pencapaian maksimal dalam ketiga dimensi tersebut.

➤ Penjelasan Tentang Rentang

1. Nilai Minimum IPM (0)

Nilai ini didapat jika sebuah negara memiliki:

- Harapan hidup mendekati 20 tahun (minimum historis).
- Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah mendekati 0 tahun.
- Pendapatan nasional bruto per kapita mendekati \$100 (d disesuaikan dengan daya beli).

2. Nilai Maksimum IPM (1)

Nilai ini didapat jika sebuah negara memiliki:

- Harapan hidup lebih dari 85 tahun (nilai maksimum).
- Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di atas 15 tahun.
- Pendapatan nasional bruto per kapita mendekati \$75.000 atau lebih (d disesuaikan dengan daya beli).

Penggunaan Skala IPM

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori pembangunan manusia:

1. **Pembangunan Manusia Sangat Tinggi:** $IPM \geq 0.8$
2. **Pembangunan Manusia Tinggi:** $0.7 \leq IPM < 0.8$
3. **Pembangunan Manusia Menengah:** $0.55 \leq IPM < 0.7$
4. **Pembangunan Manusia Rendah:** $IPM < 0.55$

Klasifikasi ini membantu pembuat kebijakan, peneliti, dan lembaga internasional memahami kemajuan relatif negara-negara dan menetapkan prioritas pembangunan.

2.1.5 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Manfaat utama dari IPM adalah sebagai alat evaluasi dan perencanaan

kebijakan. Berikut adalah beberapa manfaat dan kegunaannya yang lebih spesifik:

1. Mengukur Kinerja Pembangunan

IPM berfungsi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan manusia dari waktu ke waktu. Karena indikator ini melibatkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, IPM memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dibandingkan hanya mengandalkan angka-angka ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) berhubungan erat dengan peningkatan IPM baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di sisi lain, faktor-faktor seperti krisis ekonomi dapat memengaruhi IPM secara negatif, sebagaimana yang terjadi di Indonesia selama krisis ekonomi tahun 2008 (Setiawan & Hakim, 2013).

2. Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan

IPM memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat. Dengan memahami elemen-elemen yang membentuk IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Contohnya:

- **Di bidang pendidikan:** Data IPM dapat menunjukkan wilayah mana yang memiliki angka rata-rata lama sekolah yang rendah. Hal ini mendorong pemerintah untuk memprioritaskan investasi dalam infrastruktur pendidikan, subsidi pendidikan, atau pelatihan guru.
- **Di bidang kesehatan:** IPM juga dapat menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat melalui indikator harapan hidup. Jika angka harapan hidup rendah, kebijakan kesehatan seperti peningkatan akses ke fasilitas medis atau program imunisasi dapat menjadi prioritas.

- **Di bidang ekonomi:** Pendapatan nasional bruto per kapita sebagai komponen IPM membantu pemerintah memahami standar hidup masyarakat. Wilayah dengan pendapatan rendah dapat dijadikan target untuk program pengentasan kemiskinan atau peningkatan akses terhadap pekerjaan.

3. Alat untuk Memonitor Ketimpangan

IPM juga sangat bermanfaat untuk memetakan ketimpangan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Misalnya, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat disparitas pembangunan manusia antar daerah, yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai IPM di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan memanfaatkan data IPM, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah yang tertinggal dan memprioritaskan intervensi pembangunan di wilayah-wilayah tersebut.

4. Mengidentifikasi Pengaruh Faktor Eksternal

IPM membantu mengukur dampak berbagai faktor eksternal terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pajak pendapatan, desentralisasi pemerintahan, dan krisis ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Dalam jangka panjang, pengelolaan faktor-faktor ini secara baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, penelitian oleh Setiawan dan Hakim (2013) menunjukkan bahwa di Indonesia, kebijakan ekonomi seperti peningkatan PDB dan pajak pendapatan (PPN) memberikan kontribusi positif terhadap IPM. Namun, krisis ekonomi tahun 2008 terbukti memberikan dampak negatif pada nilai IPM, sementara krisis tahun

1997 dan kebijakan desentralisasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa IPM tidak hanya mencerminkan kondisi kesejahteraan, tetapi juga menjadi alat untuk memahami dampak kebijakan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat.

5. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah

IPM juga digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah dalam membangun masyarakat. Pemerintah sering menjadikan IPM sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dalam laporan resmi. Ketika IPM suatu wilayah mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, penurunan IPM bisa menjadi peringatan bahwa kebijakan yang diambil belum optimal.

6. Meningkatkan Kesadaran Publik

Publikasi data IPM oleh pemerintah dan organisasi internasional membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek-aspek pembangunan manusia. Dengan kesadaran ini, masyarakat dapat lebih terlibat dalam mendukung program-program pembangunan yang diluncurkan pemerintah, seperti program pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan.

7. Menarik Investasi

Wilayah dengan nilai IPM yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor, karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik, lingkungan hidup yang sehat, dan standar hidup yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan IPM dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan menarik lebih banyak investasi domestik maupun asing.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari peningkatan produktivitas yang didorong oleh spesialisasi tenaga kerja, mekanisme pasar, dan akumulasi modal. Dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776), ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terjadi ketika setiap individu diberi kebebasan untuk bekerja sesuai dengan kepentingannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Adam Smith percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan perbaikan layanan kesehatan. Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan nasional meningkat, yang memungkinkan lebih banyak investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dua pilar utama dalam peningkatan IPM.

Adam Smith juga menekankan pentingnya pemerintah dalam menyediakan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan adanya sistem ekonomi yang efisien dan inklusif, masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, dalam perspektif Adam Smith, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan produksi dan perdagangan, tetapi juga tentang bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas manusia, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM suatu negara.

2.2.1 Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa teori- teori Pertumbuhan Ekonomi dari beberapa ahli, teori tersebut antara lain :

1. Teori Pertumbuhan Malthusian (Thomas Malthus)

Teori pertumbuhan Malthusian yang diperkenalkan oleh Thomas Robert Malthus pada akhir abad ke-18 berangkat dari kekhawatiran tentang ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan produksi pangan. Malthus berpendapat bahwa populasi manusia cenderung tumbuh secara eksponensial (2, 4, 8, 16, dst.), sementara produksi pangan hanya meningkat secara linier (1, 2, 3, 4, dst.). Ketidakseimbangan ini, menurutnya, akan membawa dunia pada ancaman krisis kelaparan, kemiskinan, dan penurunan kesejahteraan jika tidak ada upaya pengendalian yang efektif. Malthus memperkenalkan dua mekanisme untuk menyeimbangkan populasi dan ketersediaan sumber daya. Yang pertama adalah *preventive checks* atau pengendalian pencegahan, yang mencakup langkah-langkah seperti penundaan pernikahan dan pengendalian kelahiran untuk mengurangi angka kelahiran. Yang kedua adalah *positive checks* atau pengendalian positif, yang meliputi kejadian-kejadian yang secara alami akan menurunkan populasi, seperti bencana alam, penyakit, dan kelaparan.

Kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tiga indikator utama yakni kesehatan, pendidikan, dan pendapatan teori Malthusian memiliki implikasi yang relevan. Jika pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan kemampuan produksi pangan dan ketersediaan sumber daya ekonomi, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, dan

standar hidup yang layak. Semua ini pada akhirnya dapat menurunkan nilai IPM suatu wilayah.

2. Teori Karl Marx

Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom terkemuka, mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada dinamika kapitalisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar peningkatan produksi dan pendapatan nasional, tetapi juga mencerminkan bagaimana kesejahteraan manusia terbagi di dalam sistem ekonomi. Pemikiran Marx sangat relevan dalam memahami Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam analisis Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama: bourgeoisie (pemilik modal) dan proletariat (pekerja/buruh). Kapitalisme, menurutnya, berkembang melalui eksploitasi tenaga kerja oleh pemilik modal, di mana surplus keuntungan diakumulasi oleh kaum borjuis, sementara para pekerja hanya mendapatkan upah yang cukup untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang tajam, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya IPM, terutama dalam aspek akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam konteks kesehatan, sistem kapitalisme sering kali mengabaikan kesejahteraan pekerja. Upah yang rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi menyebabkan rendahnya kualitas hidup, meningkatkan angka penyakit, dan menurunkan angka harapan hidup. Marx melihat ini sebagai konsekuensi langsung dari akumulasi modal yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan sosial.

Di bidang pendidikan, Marx berpendapat bahwa kapitalisme cenderung membatasi akses pendidikan bagi kelas pekerja. Sistem ini menciptakan siklus ketidaksetaraan, di mana anak-anak dari keluarga miskin kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, sehingga tetap terjebak dalam kemiskinan dan eksploitasi tenaga kerja. Pendidikan hanya menjadi alat bagi pemilik modal untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam aspek pendapatan dan standar hidup, Marx mengkritik bagaimana kapitalisme menciptakan ketimpangan yang terus melebar. Dengan meningkatnya akumulasi modal di tangan segelintir orang, kesejahteraan sebagian besar masyarakat justru terabaikan. Pekerja tetap hidup dalam kemiskinan, sementara pemilik modal menikmati keuntungan besar dari hasil kerja mereka. Akibatnya, standar hidup bagi kelas pekerja tetap rendah, yang tercermin dalam skor IPM yang tidak optimal di banyak negara kapitalis yang gagal menerapkan sistem kesejahteraan sosial. Sebagai solusi, Karl Marx mengusulkan transisi dari kapitalisme ke sosialisme, di mana alat produksi dimiliki secara kolektif dan distribusi kekayaan dilakukan secara lebih adil. Dalam sistem ini, pendidikan dan layanan kesehatan tidak lagi menjadi hak istimewa bagi segelintir orang, melainkan hak universal bagi seluruh masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial meningkat, yang pada akhirnya akan memperbaiki angka IPM secara signifikan.

2.2.2 Jenis – Jenis Pertumbuhan Ekonomi

Thomas Malthus dan Karl Marx memiliki pandangan yang berbeda mengenai pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis pertumbuhan ekonomi menurut kedua tokoh tersebut:

1. Thomas Malthus (Teori Pertumbuhan Malthusian)

Malthus memandang pertumbuhan ekonomi dalam kerangka hubungan antara populasi dan produksi pangan. Jenis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Malthus dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi yang Tertahan oleh Populasi:**

Pertumbuhan ekonomi menurut Malthus sering tertahan karena pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat sulit meningkat, dan masyarakat akan mengalami siklus kelaparan dan kemiskinan.

- **Pertumbuhan yang Bergantung pada Sumber Daya:**

Pertumbuhan ekonomi hanya dapat dipertahankan jika ada peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian atau sumber daya lain yang dapat mendukung populasi yang terus berkembang.

- **Pertumbuhan dengan Kendala Alamiah (Malthusian Trap):**

Malthus percaya bahwa dalam kondisi tanpa inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi akan selalu kembali ke titik keseimbangan rendah karena tekanan populasi yang menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita.

2. Karl Marx (Teori Pertumbuhan Ekonomi Marxian)

Karl Marx memiliki pandangan yang berbeda dan menekankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan konflik kelas dan dinamika kapitalisme. Jenis-jenis pertumbuhan ekonomi menurut Marx dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi Kapitalis:**

Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi terjadi karena eksploitasi tenaga kerja dan akumulasi modal oleh kaum kapitalis. Marx percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme bersifat tidak stabil karena krisis overproduksi yang berulang.

- **Pertumbuhan Ekonomi yang Dialektis:**

Pertumbuhan ekonomi menurut Marx bersifat dialektis, artinya perubahan terjadi karena konflik antara kelas buruh (proletariat) dan pemilik modal (borjuis). Konflik ini akan mendorong perubahan struktural dalam sistem ekonomi.

- **Pertumbuhan Menuju Sosialisme:**

Marx memprediksi bahwa kapitalisme akan runtuh dan digantikan oleh sosialisme, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi didasarkan pada eksploitasi tetapi pada distribusi yang adil dan kepemilikan bersama atas alat produksi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Hasil penelitian
1	Pane et al. (2023)	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan,	Menganalisis hubungan antara indikator kesehatan	Pembangunan infrastruktur kesehatan secara simultan

		Pendidikan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.	(angka harapan hidup, status gizi, infrastruktur kesehatan) dengan variabel ekonomi seperti PDB dan tingkat kemiskinan.	berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, tetapi secara parsial, pengaruhnya tidak sekuat variabel jumlah penduduk
2	Yendra et al., (2023)	Pengaruh Kemiskinan, Kesehatan, dan Status Gizi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang	Menggunakan data sekunder dalam bentuk time series dan panel data.	Angka harapan hidup memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak selalu berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan
3	Wibowo, (2014).	Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah	Data diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.	Pembiayaan pendidikan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, efeknya lebih signifikan jika didukung oleh kebijakan ekonomi yang tepat
4	Hasanah (2018)	Analisis Pengaruh Teknologi, Pendidikan, dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan ASEAN (Studi Kasus	Menggunakan metode analisis data kuantitatif, seperti regresi panel data dan fixed effect model.	Angka melek huruf dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang menunjukkan

		Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam Periode 2000-2015)		dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Rifa'i, A. (2015).	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Pengeluaran Pemerintah (Sektor Kesehatan dan Pendidikan) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung.	Menggunakan metode Regresi OLS	Angka melek huruf dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
6	Wibowo, D. A. (2014).	Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah	Menggunakan metode Analisis Data Panel	Pembiayaan pendidikan dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti keduanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
7	Sari, D. P. (2019).	Analisis Pengaruh Tingkat Kualitas Hidup Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Fokus utamanya terletak pada hubungan Kualitas hidup Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan harapan lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita berpengaruh positif signifikan.
8	Sari, D. P., & Hidayat, R. (2021).	Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Produk	Penelitian ini mencakup salah satu	Studi ini menunjukkan bahwa angka

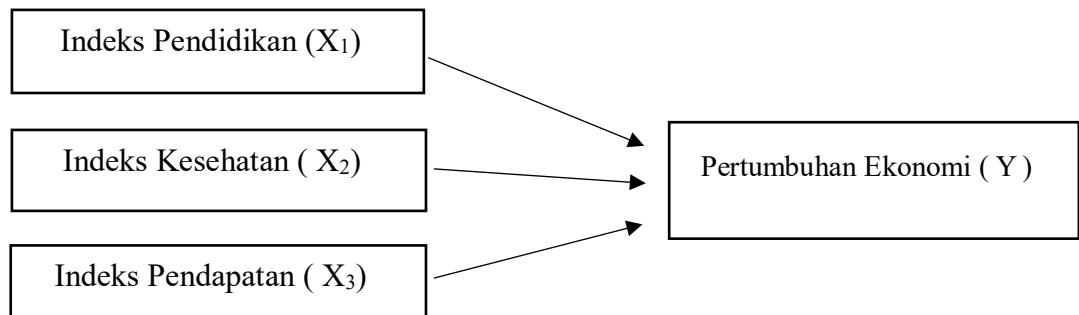
		Domestik Regional Bruto di Indonesia	indikator ipm dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel utama.	harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.
9	Ginanjar Aji Nugroho (2016)	“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM”	Membahas peran pendidikan dan kesehatan terhadap IPM.	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan meningkatkan IPM, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengindikasikan pentingnya belanja pemerintah dalam mempengaruhi kualitas manusia.
10	Muhammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim (2013)	“Indeks Pembangunan Manusia Indonesia”	Membahas faktor ekonomi terhadap IPM.	PDB dan pajak penghasilan memengaruhi IPM secara signifikan baik dalam jangka panjang maupun pendek, sementara desentralisasi dan krisis ekonomi memberikan dampak beragam.

2.4 Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama yang mencerminkan kualitas manusia berdasarkan tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam konteks teori pertumbuhan endogen, modal manusia merupakan faktor kunci yang berkontribusi terhadap

peningkatan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di Indonesia, IPM menunjukkan tingkat pembangunan yang beragam di berbagai provinsi. Daerah dengan IPM tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sedangkan daerah dengan IPM rendah menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Persamaan Regresi Berganda

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Di mana:

- Y = Variabel dependen
- a = Konstanta (intersep)
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen
- X₁, X₂, X₃ = Variabel independen
- e = Error (kesalahan residu)

2.5 Hipotesis

Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan

ekonomi adalah hubungan timbal balik yang kompleks. IPM, yang merupakan ukuran kesejahteraan manusia berdasarkan indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, berperan sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan negara untuk meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan dan kesehatan.

1. Hipotesis 1 : Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Komponen pendidikan dalam IPM, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penelitian oleh Aminuddin Anwar (2017) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Jawa. Dengan menganalisis data panel dari 114 kabupaten/kota selama periode 2004-2013, penelitian ini menemukan bahwa rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan inovatif, yang pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas ekonomi. Pendidikan memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pasar kerja, menciptakan tenaga kerja yang mampu mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.

2. Hipotesis 2 :Pengaruh Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kesehatan, yang diukur melalui angka harapan hidup dalam IPM, juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Individu yang lebih sehat cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi karena mereka dapat

bekerja lebih efisien dan memiliki risiko absen kerja yang lebih rendah. Studi yang sama oleh Anwar mencatat bahwa peningkatan angka harapan hidup di Pulau Jawa selama periode penelitian secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, populasi yang sehat mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat, memungkinkan alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih produktif.

3. Hipotesis 3 : Pengaruh Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh UNDP. IPM, yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, menunjukkan kualitas hidup suatu populasi. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola publik yang baik, seperti yang bersifat transparan dan akuntabel, secara signifikan mendukung peningkatan IPM dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, komponen seperti rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, sementara harapan hidup juga berperan penting meskipun dengan dinamika tertentu. Secara keseluruhan, peningkatan IPM secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan yang layak.